

Diferensiasi dan hirarki pengaturan kerjasama pertahanan

Kusnanto Anggoro

kusanggoro@gmail.com

Pengantar

- Dalam praktek di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, pada umumnya UU Kerjasama Pertahanan dengan sesuatu negara tidak lebih dari sekedar pengukuhan atas Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang telah dibuat, dan bahkan sudah dilaksanakan, jauh sebelumnya. Bahkan dalam banyak kasus, teks RUU juga tidak jauh berbeda dari teks MOU.UU lebih dimaksudkan sebagai landasan hukum daripada sesuatu yang bersifat strategis dan operasional dalam kerjasama pertahanan.
- Landasan hukum itu memang diperlukan untuk menyusun program dan memperoleh anggaran tetapi tidak selalu terkait (dapat dikaitkan) dengan strategi pertahanan, modernisasi alutsista. Pernyataan dalam UU – misalnya kerjasama lain yang menjadi kesepakatan bersama, pembiayaan ditanggung pihak-pihak masing-masing, bermanfaat untuk memenuhi prinsip resiprositas dan transparansi tetapi tidak cukup untuk dapat digunakan sebagai kinerja fungsi pertahanan negara.

Model pengaturan

- Di beberapa negara dikenal diferensiasi dan hirarki. Istilah diferensiasi terkait dengan sector/bidang kerjasama, misalnya perlindungan fasilitas nuklir, pengamanan perbatasan, riset ruang angkasa dll. Istilah hirarki terkait dengan kadar legalitas ketentuan perundangan, misalnya treaty, subordinate treaty, dan package of defence initiatives.
- Contoh yang pertama adalah, misalnya, British-French Defence Cooperation Treaty Agreement yang pada awalnya disepakati antara PM Inggris David Cameron dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy di Lancaster House (London, 2010). Seperti diketahui, UU tersebut hingga kini belum dioperasionalisasikan menjadi pengaturan yang lebih ditel, misalnya tentang perlindungan keamanan sarana nuklir, dan paket inisiatif.
- Tradisi UU kerjasama pertahanan Amerika lebih bersifat operasional – sebagian diantaranya karena tidak ada hirarki antara law, act, atau memorandum of understanding/letter of intent. Dalam semua ketentuan hukum tersebut mengandung unsur-unsur tujuan dan strategi operasional (substantive), penggunaan dan pengelolaan peralatan (operasional). Lihat misalnya US-Jordan (2015) dan AS-India (2017).

Diferensiasi dan hirarki

| UU (UUD) | PP (UU) | MoU, Letter of Intent, implementing arrangement lain |
|---|--|--|
| Perdamaian dunia | Diplomasi preventive, peace keeping mission, | Strategic dialogue, visit and exchange of officers and officials |
| pertahanan negara melalui mencegah, menangkal dan menindak ancaman | Join/coordinated patrol, intelligence sharing, show of force, modernisasi alutsista dan kompetensi tempur prajurit | Interoperability antar negara yang mengikuti misi join patrol untuk specific threats (maritime terrorism, border protection) |
| Peningkatan kapasitas pertahanan dalam menghadapi perubahan global, regional dan nasional | Strategi dan gelar pertahanan negara, modernisasi alutsista, defense industries, | Interoperability, imilitary intelligence sharing, training and education |
| Peran militer dalam operasi non-perang (civic mission, humanitarian and disaster reliefes, counter terrorism) | Medical, logistical, administrative, perlindungan infrastruktur strategis | interoperability |
| Profesionalisme militer | wariorships and discipline, technical competence and proficiency, | Training and education |

Tipikal RUU Kermahan RI

- Asas/prinsip – kedaulatan, kesetaraan, timbal balik, saling menghormati, konsensualisme, kepastian hukum, manfaat, **rebug sig stantibus**,
- Landasan – filosofis, sosiologis, yuridis (dan analisis peraturan perundangan terkait)
- Ruang lingkup - dialog strategis, pertukaran kunjungan, kerjasama materil pertahanan, berbagi informasi dan/atau pengalaman, pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, bidang-bidang lain yang disepakati bersama
- Nothing is wrong. Namun
- menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan ruang control oleh parlemen
- Kelemahan dalam non-specificity dan relevansi bidang kerjasama

Peluang dan tantangan

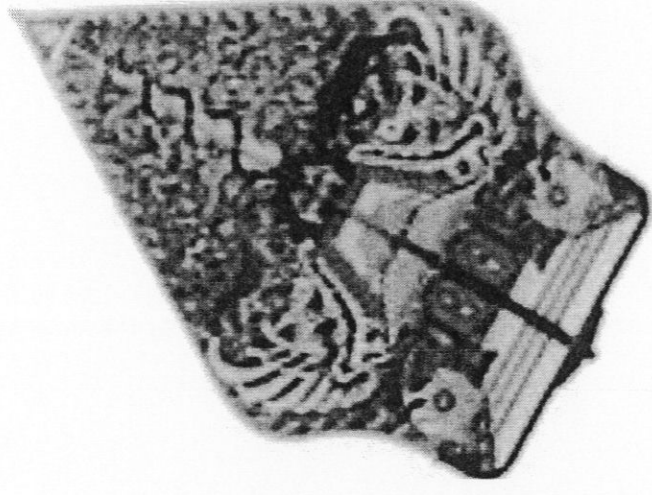
Belanda, Spanyol maupun Serbia membuka beberapa ruang baru untuk kerjasama pertahanan – baik untuk dialog masalah keamanan global, memajukan industri pertahanan/ alutsista, pendidikan dan latihan dll.

| | Belanda | Spanyol | Serbia | Indonesia |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Score (Rank) | Score (Rank) | Score (rank) | score (Rank) |
| Inovasi | 63.36 (3) | 48.81 (28) | 35.34 (55) | 30.10 (87) |
| GSI 0.424 (70) | 0.783 (12) | 0.519 (54) | 0.311 (110) | |
| Competitiveness | 5.66 (4) | 4.70 (32) | 4.14 (90) | 4.69 (41) |
| Kesiapan teknologi | 6.3 (3) | 5.7 (28) | 4.2 (72) | 3.9 (80) |
| Efisiensi birokrasi | 14 | 18 | n.a. | (?) |
| No procedures/ days complete | 5/62 | 94/58 | 58/98 | 94/49 |

Persoalannya adalah substansi dialog, seberapa besar peluang itu (tidak satupun merupakan 25 negara pengimpor/ekspor terbesar dunia, sudah teresap/menyerap negara lain, trend menurun dsb), kesiapan institusional, legal dan operasional dari pihak Indonesia. rencana jangka menengah dan panjang, koordinasi Kemenhan, Mabes TNI, Kemenlu dan BUMN.

Catatan penutup

- Persoalan tentang relevansi isu dengan peran pengawasan DPR dalam pelaksanaan UU.
- hirarki legal tidak selaras dengan kebutuhan diferensiasi substansi bidang pertahanan negara
- Cross functional bidang pertahanan negara tidak seirama dengan core competence maupun “alat” yang dimiliki kementerian



1. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Perlawanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation)',
2. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perlawanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)',
3. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence).

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Akademisi,

Hari, tanggal : Selasa, 28 Agustus 2018

Ruang Rapat Komisi I DPR RI

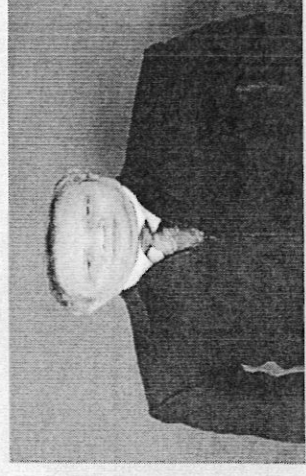
Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI

Teuku Rezasyah, Ph.D

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran, Jatinangor



PERKEMBANGAN DOKUMEN

| NAMA DOKUMEN | TANGGAL |
|--|-------------------------------------|
| Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Perlahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation). | Den Haag, 4 Februari 2014 |
| Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kngdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence). | Jakarta, 13 September 2011 |
| Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence). | Jakarta, 13 Februari 2013 |



1. Kuang lingkup kerja sama, meliputi:

a. dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;

b. pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Pihak;

c. kerja sama materiil pertahanan;

d. berbagi informasi dan/atau pengalaman;

e. pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara;

f. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan dan latihan; dan

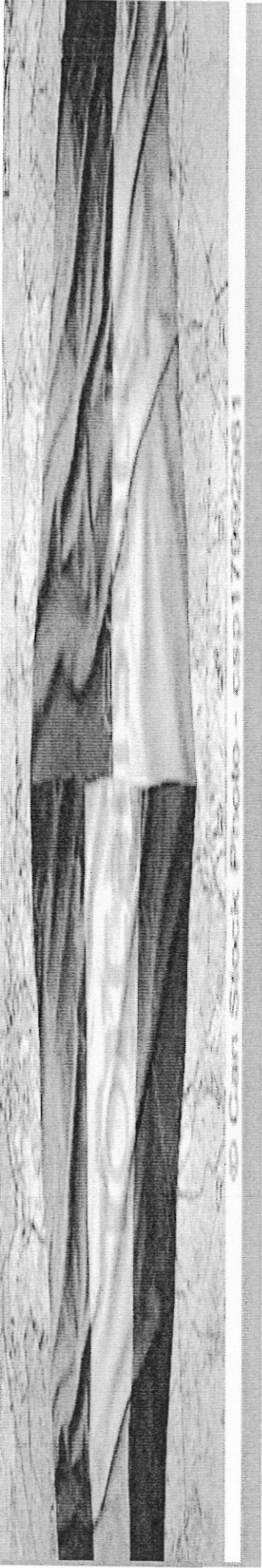
g. bidang lain yang disepakati bersama.

1. Semua unsur diatas sifat nya netral, umum, biasa, dan menunjukkan harapan kedua negara untuk sebuah hubungan yang baik.
2. Dialog Strategis sangat penting, karena memungkinkan RI medalami perkembangan terkini atas Belanda dan NATO , dalam konteks regional dan global.
3. Untuk kerjasama materiil pertahanan, perlu penelaahan yang spesifik, dengan melibatkan R&D dari kalangan TNI, Kemhan, dan Industri Strategis di dalam negeri, terutama guna mewaspadaai kelangkaan materiil strategis akibat pelarangan negara ketiga atas RI.
4. Untuk pengembangan SDM, penting menyimak tema Buku Putih Pertahanan Belanda Tahun 2018: 'Invest in our people, strength and visibility'. Dapat dikhususkan pada aspek-aspek seperti: Referensi dan Dokumentasi atas arsip perang semasa Hindia Belanda;



Untuk bidang lain, perlu dipikirkan perlunya Kemhan dalam kerangka MOOTW memikirkan sektor-sektor unggulan Belanda guna dikerjasamakan:

- (a) Tata Kelola Air dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs).
- (b) Keamanan pangan.
- (c) Energi Terbarukan.
- (d) Tata Kelola Pemerintahan.
- (e) Penyelarasan batas-batas administrasi pemerintahan dengan arsip masa Kolonial.

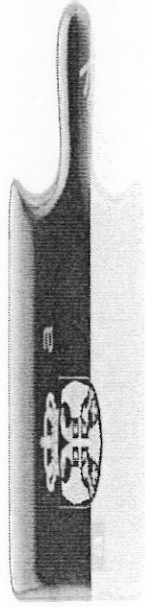


3. Pertukaran informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan perlindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.

Aspek ini perlu dicermati sejak dini, karena tidak ada jaminan Belanda tidak akan membagikan informasi strategis dengan mitra lainnya dalam NATO. Karena NATO mengenal mekanisme yang bernama 'Intelligence Sharing', yang lingkungannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan NATO untuk periode tertentu. Sebagai anggota NATO yang junior, maka Belanda sulit menolak tekanan dari negara yang lebih besar dalam NATO.

Belanda secara khusus memiliki pandangan kritis atas Islam di dunia. Ada baiknya Belanda digalang sedemikian rupa, agar RI memiliki informasi dini sebelum pihak Belanda membuat kebijakan yang kontroversial, dan meresahkan masyarakat Muslim di dunia.

Dari Buku Putih Pertahanan Belanda Tahun 2018, dapat diketahui jika Belanda memiliki kekuatiran khusus atas: Serangan Saiber, Terorisme, dan perilaku Rusia di Eropa yang berpotensi membahayakan Belanda. Apakah perlu membagikan informasi perihal kerjasama RI-Rusia yang dipayungi Comprehensive Partnership?.



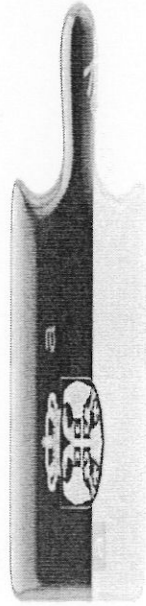
SERBIA



INDONESIA

1. Area kerja sama, meliputi:
 - a. kebijakan pertahanan dan strategis;
 - b. dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.

1. Semua unsur diatas sifat nya netral, umum, biasa, dan menunjukkan harapan kedua negara untuk sebuah hubungan yang baik.
2. Untuk aspek kebijakan pertahanan dan strategis, perlu diperhatikan sensitivitas negara ex-Yugoslavia yang lain seperti Bosnia, yang pernah dihancurkan oleh Serbia, dan juga Malaysia yang memiliki kedekatan khusus dengan Bosnia.
3. Perihal logistik dan industri pertahanan, R&D TNI dan industri strategis militer RI sudah memiliki referensi yang baik atas produk dari Serbia.
4. Perihal Diklat, perlu disiapkan SDM RI guna mengikuti pendidikan setingkat Sesko di Serbia, sehingga dapat menjadi pengelola hubungan bilateral di bidang pertahanan.



SERBIA

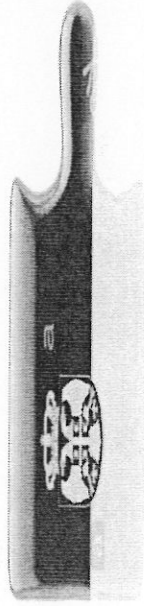


INDONESIA

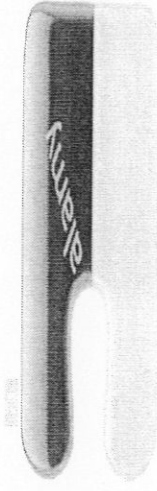
 alamy stock photo

2. Bentuk kerja sama, meliputi:
- a. kunjungan pejabat;
 - b. dialog pertahanan dan strategis;
 - c. pertukaran intelijen;
 - d. pertukaran pengalaman dan konsultasi;
 - e. program pelatihan dan pendidikan;
 - f. partisipasi dalam konferensi, simposium dan seminar;
 - g. pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan; dan
 - h. bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.

Butir-butir diatas diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pihak Indonesia. Namun menyimak hasil kunjungan pimpinan Komisi I DPR RI ke Serbia bulan Agustus tahun 2017, sebenarnya Serbia mengharapkan investasi ekonomi RI di Serbia.



SERBIA



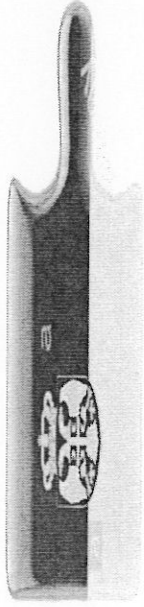
INDONESIA

 alamy stock photo

MDS72P
www.alamy.com

3. Pembentukan Komite Bersama guna mengoordinasikan, memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman.
4. Pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia, sedangkan informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terpisah.
5. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pertemuan dan penyambutan Komite Bersama dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.
6. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.
7. Para Pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur negara masing-masing, serta dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Untuk Komite Bersama, perlu disiapkan secara khusus beberapa perwira senior dari pihak RI, guna secara rutin berkonsultasi di tingkat kebijakan. Mereka diharapkan bertugas untuk 3-5 tahun, agar mendalami aspek-aspek bilateral pertahanan



SERBIA



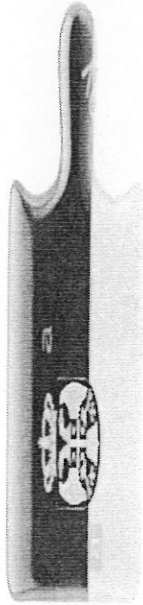
INDONESIA

 **alamy stock photo**

www.alamy.com

4. Pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia, sedangkan informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terpisah.
5. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pertemuan dan penyambutan Komite Bersama dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.
6. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.
7. Para Pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur negara masing-masing, serta dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Perihal pertukaran informasi, perlu dilakukan kategorisasi atas informasi yang bersifat rahasia dan tidak rahasia, untuk dimengerti oleh kalangan TNI dan mitra mereka.



SERBIA



INDONESIA

 alamy stock photo

M0878P
www.alamy.com

Perihal HAKI, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Perlunya mempelajari berbagai dokumen pertahanan yang telah ditandatangani Serbia dengan negara lain, khususnya pada aspek Hak Kekayaan Intelektual, guna menghindari terjadinya kesilapan pemahaman.
2. Perlunya mengevaluasi kerjasama dan alih teknologi yang selama ini telah berjalan dalam berbagai proyek pembangunan, antara Serbia dengan negara lain.
3. Perlunya mengevaluasi IPR atas teknologi sipil dan militer yang dikuasai RI seperti BUMNIS, dan yang atas nama WNI saat ini, misal: Prof. Habibie, guna menghindari biaya IPR yang tidak perlu, serta mengoptimalkan IPR milik WNI guna aplikasi yang lebih mendalam.
4. Perihal Pembiayaan agar sejalan dengan APBN dan APBN-P, perlu senantiasa dikonsultasikan dengan DPR RI.

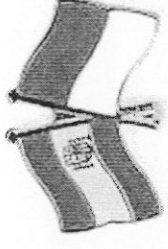


INDONESIA-SPANYOL

1. Bidang kerja sama, meliputi:

- a. pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata;
- b. pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer dan bidang lainnya yang disepakati bersama;.

Pada prinsipnya RI telah memiliki pengalaman yang baik dan lama dalam berhubungan dengan Spanyol, yang dapat dirunut dari pendirian PTDI, yang mempertemukan berbagai produk yang disebut Cassa-Nurtanio (CN) yang hingga saat ini bertahan.

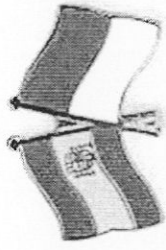


INDONESIA-SPANYOL

c. pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja sama dalam bidang:

- 1) operasi pemeliharaan perdamaian;
- 2) bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana;
- 3) operasi pencarian dan penyelamatan;
- 4) manajemen krisis;
- 5) komando, kendali, komunikasi dan sistem informasi;
- 6) pendidikan, pelatihan dan latihan;
- 7) kegiatan lainnya yang disepakati bersama.

Bagian ini sudah dikuasai dengan baik oleh TNI dan Kemhan. Tentunya perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.



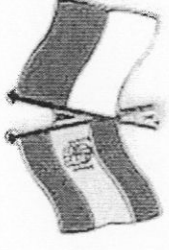
INDONESIA-SPANYOL

- d. dukungan peran serta personel Angkatan Bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat;
- e. peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;
- f. pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan, meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.

Bagian ini memungkinkan RI melakukan diversifikasi alut sista, sehingga tidak mudah diembargo oleh negara besar tertentu.

RI agar meningkatkan kualitas kerjanya dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian di bidang IT dan pertahanan, termasuk meningkatkan sinerginya dengan BUMNIS yang telah ada.

INDONESIA-SPANYOL



Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual.

Sama halnya dengan Belanda, Spanyol adalah anggota NATO. Maka RI Perlu menyikapi aspek ini secara kritis, karena RI juga terikat hal serupa dengan negara lain dalam konteks Comprehensive Security, Strategic Partnership, dan kerjasama pertahanan serupa dengan negara lain.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Teuku Rezasyah
Program Studi Hubungan Internasional
FISIP-Universitas Padjadjaran, Jatinangor

(teuku.rezasyah@unpad.ac.id)

WA: +62-859-749-23-789



MAKNA STRATEGIS KERJASAMA PERTAHANAN BILATERAL ¹

Oleh: Prof. Anak Agung Banyu Perwita, PhD².

Dalam hubungan internasional, aspek keamanan dan pertahanan selalu dianggap sebagai kepentingan nasional terpenting dan tujuan utama dari kebijakan luar negeri negara manapun. Dalam konteks implementasi kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan, hal ini akan tercermin pada diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut, khususnya oleh Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan dan kerjasama pertahanan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Diplomasi pertahanan merupakan instrumen bagi terciptanya kerjasama pertahanan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral.

Agar dapat melaksanakan diplomasi pertahanan yang optimal guna mencapai kepentingan keamanan dan pertahanannya sebuah negara akan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Upaya ini dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu: (1) peningkatan kapabilitas pertahanan yang dilakukan oleh negara itu sendiri (*self help*) dan atau (2) peningkatan kapabilitas pertahanan melalui kerjasama pertahanan (baik bilateral maupun multilateral) dengan negara lainnya. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan adalah alat untuk melindungi keamanan dan pertahanan negara untuk memperkuat pencapaian tujuan kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan nasional suatu negara.

Dalam konteks bilateral, kerjasama pertahanan dengan negara lain dilakukan melalui beberapa pertimbangan seperti: alasan sejarah, kemampuan pertahanan negara lain yang lebih kuat dan modern, kesamaan kultur strategis dan kedekatan geografis. Kerjasama pertahanan, oleh karena itu, merupakan alat penting hubungan bilateral untuk membangun jembatan persahabatan, saling percaya, mencegah konflik, dan membangun kapasitas pertahanan yang lebih kuat.

Kerja sama bilateral pertahanan tidak hanya akan membangun kepercayaan di antara negara-negara (*mutual trust*), tetapi juga memfasilitasi kerjasama di tingkat strategis, politik

¹ Bahan masukan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI terkait dengan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda, Kementerian Pertahanan kerajaan Spanyol dan Serbia, 27 Agustus 2018.

² Penulis adalah Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Kota Jababeka-Bekasi.

dan ekonomi. Hal ini tercermin melalui kunjungan pertukaran pejabat, pelatihan individu dan gabungan, latihan militer bersama, pengadaan peralatan, transfer teknologi militer dan pengembangan doktrin umum.

Kerja sama pertahanan semacam itu juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas global dan regional melalui dialog dan pertukaran ide secara timbal balik. Dalam tingkat yang lebih tinggi, kemampuan pertahanan akan memiliki sistem dan peralatan yang bisa dioperasikan, yang dapat memfasilitasi kerja sama fungsional secara bilateral.

Bidang Kerja Sama Bilateral Pertahanan:

Kerja sama bilateral pertahanan memiliki banyak dimensi. Hal ini tidak hanya dapat dipahami melalui keterlibatan dan ikatan pertahanan, tetapi juga melalui hubungan bilateral yang ditingkatkan secara teratur. Oleh karena itu, kerjasama pertahanan dapat dipahami setelah melakukan analisis secara mendalam yang diwujudkan melalui bidang berikut: (1) Latihan Militer Bersama, (2) peningkatan kemampuan personil militer melalui aktivitas pendidikan bersama, (3) Perjanjian Perdagangan Pertahanan Bilateral, (4) Transfer teknologi.

Makna Strategis Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama terkait Pertahanan.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam naskah akademik, kerjasama bilateral dengan Belanda memiliki makna strategis yang sangat tinggi. Hubungan Bilateral Indonesia dan Belanda sudah berlangsung sejak lama (khususnya terkait dengan alasan sejarah) dan berjalan relative sangat baik. Pengesahan nota kesepahaman relative sangat terlambat mengingat kerjasama pertahanan dengan Belanda juga sudah berlangsung lama. Penulis sendiri pernah mengadakan kunjungan ke salah satu pangkalan AL Kerajaan Belanda dimana banyak kapal-kapal TNI AL merupakan buah karya dari kerjasama pertahanan ini. Oleh karena itu, pengesahan nota kesepahaman kerjasama pertahanan antara RI dan Belanda sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPR RI secepatnya .

Makna Strategis Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Dalam konteks kerjasama bilateral pertahanan dengan Spanyol, Indonesia juga telah mendapatkan berbagai keuntungan politik, ekonomi dan pertahanan yang sangat besar. Sebagaimana juga sudah dijelaskan dalam naskah akademik, Kerjasama pertahanan udara antara Spanyol dan Indonesia sudah diawali dengan Airbus dan Cassa Spanyol sejak akhir dekade 70an. Oleh karena itu pengesahan nota kesepahaman ini secara ekonomi, politik dan pertahanan juga memiliki makna strategis yang sangat tinggi dan perlu dilakukan dengan secepatnya.

Makna Strategis Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Sebagai sebuah negara yang memiliki cakupan geografis di Eropa Selatan dan Timur, Serbia memiliki makna penting dalam kaitan hubungan internasional yang terjadi di Kawasan tersebut khususnya antara UE dan NATO serta pola interaksinya dengan Rusia. Olehkarenanya, Serbia memiliki makna strategis baik secara ekonomi, politik dan pertahanan di Kawasan tersebut.

Dengan nilai geo-strategis yang dimilikinya, Serbia menjadi salah satu negara yang berpotensi menjadi negara besar di Kawasan Eropa, Khususnya di sub Kawasan Eropa Selatan dan Timur. Sebagaimana yang juga dijelaskan pada naskah akademik, Serbia memiliki potensi industry pertahanan yang relative modern dan berdaya saing tinggi namun memiliki tingkat harga pasar yang relative murah.

Dengan demikian, kerjasama bilateral pertahanan dengan Serbia juga memiliki makna strategis yang sangat tinggi bagi peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia. Secara ekonomi, kerjasama ini juga dapat membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar bagi produk-produk komoditas Indonesia lainnya.

Dalam konteks politik, Pengesahan nota kesepahaman ini juga dapat digunakan untuk memperluas cakupan pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia. Kerjasama pertahanan ini dapat menjadi instrumen diplomasi Indonesia yang lebih kuat di Kawasan Eropa Selatan dan Timur. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan luar negeri “Bebas-Aktif” Indonesia dimana perluasan cakupan pengaruh (*sphere of Influence*) akan menjadi lebih luas lagi di masa mendatang yang mana akan meningkatkan level kerjasama bilateral yang sudah terbentuk selama ini.